

ABSTRAK

Rabiatul Afwaliah, *Problematika Implementasi Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Nrgara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Kasus Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Tahun 2022)*. . di bawah bimbingan : I. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Dan II. Dr. Wahyuddin, M.Pd. I., pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2022).

Kata kunci: Problematika, Implementasi, Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng.

Indonesia adalah Negara hukum, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang di dalamnya terdapat beberapa aspek peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai saksi tegas apabila dilanggar. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi dan ayat (3) pasal ini mengatakan bahwa kekayaan alam yang meliputi sumber daya alam bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia yang dikenal dengan kekayaan alamnya kini mengalami kelangkaan dan kenaikan harga pada minyak goreng yang terbuat dari kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui implementasi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 terhadap ketersediaan minyak goreng untuk rakyat Indonesia. *Kedua*, mengetahui kebijakan pemerintah terhadap ketersediaan minyak goreng untuk rakyat Indonesia. *Ketiga* mengetahui problematika implementasi Pasal 33 ayat (3) terhadap ketersediaan minyak goreng untuk rakyat Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-undang, sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel-artikel. Teknik untuk mengumpulkan bahan hukum tersebut yaitu menelaah referensi yang terkait dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, kebijakan pemerintah mengenai kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng belum mampu sepenuhnya mengimplementasikan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang menempati posisi pertama dalam kelas social di Indonesia. *Kedua*, problematika atau permasalahan yang terjadi terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng diantaranya adalah penetapan harga yang berubah-ubah sehingga menimbulkan praktik penimbunan oleh oknum nakal, adanya kasus korupsi ekspor minyak sawit yang menjerat pejabat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan kurangnya empati sebagian elit politik dengan pernyataan yang seolah menyepalkan akibat dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng bagi rakyat Indonesia menjadi problematika dalam mengimplementasikan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 untuk kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng tahun 2022.

ABSTRACT

Rabiatul Afwaliah, Problems with the Implementation of Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Case Study of Scarcity and Increase in Cooking Oil Prices in 2022). under the guidance of : I. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. and II. Wahyuddin, M.Pd. I., at the Postgraduate of Antasari State Islamic University Banjarmasin (2022).

Keywords: Problems, Implementation, Scarcity and Increase in Cooking Oil Prices.

Indonesia is a state of law. It is stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution that it is mean by a state of law is a state in which there are several aspects of regulations that are coercive and have strict sanctions if violated. Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution is a moral message and a cultural message in the constitution of the Republic of Indonesia in the field of economic life and paragraph (3) in this article states that natural wealth which includes

The earth's natural resources, the water and the natural resources it contains are state-controlled and used for the greatest prosperity of the people. Indonesia, which is known for its natural wealth, is now experiencing scarcity and increase the prices for cooking oil made from palm oil. This study aimed, namely: First, to determined the implementation of Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution on the availability of cooking oil for the people of Indonesia. Second, knew the government's policy on the availability of cooking oil for the people of Indonesia. Third, knew the problems of implemented Article 33 paragraph (3) on the availability of cooking oil for the people of Indonesia.

This type of research was normative legal research with a legal approach. This research used primary legal materials, namely laws, secondary which included official documents, library books, statutory regulations, scientific works, and articles. The technique for collected legal materials was to examined references related to Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution on the scarcity and increase in cooking oil prices in Indonesia.

The results of this study was: First, the government's policy regarding the scarcity and increase in the price of cooking oil has not been able to fully implement Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, especially for the lower middle class people who occupy the first position in social class in Indonesia. Second, the problems that occur with the scarcity and increase in cooking oil prices include changing prices that lead to hoarding practices by rogue elements, the existence of corruption cases in palm oil exports that ensnared officials of the Director General of Foreign Trade of the Ministry of Trade and the lack of empathy for some elites politics with statements that seem to underestimate the consequences of scarcity and increase cooking oil prices for the Indonesian people become problematic in implementing Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution for cases of scarcity and increase cooking oil prices in 2022.